



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERDAGANGAN
KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERDAGANGAN KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

2. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan keentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pelaksana Dekonsentrasi sebagai Penyelenggara Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan yang selanjutnya disebut Pelaksana Dekonsentrasi adalah dinas yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang perdagangan.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negarayang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang akan dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat PD Provinsi adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang perdagangan di daerah provinsi.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangannya kepada GWPP.
- (2) Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perdagangan dalam negeri di daerah; dan
 - b. pengembangan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah.
- (3) Pelimpahan kepada GWPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Pasal 3

- (1) GWPP menetapkan Pelaksana Dekonsentrasi dan pejabat pengelola keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kuasa pengguna anggaran/barang yang dijabat oleh Kepala PD Provinsi;
 - b. pejabat pembuat komitmen;
 - c. pejabat penguji tagihan/penandatanganan surat perintah membayar; dan
 - d. pejabat akuntansi dan bendahara pengeluaran.
- (3) GWPP menyampaikan penetapan Pelaksana Dekonsentrasi dan penetapan pejabat pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perbendaharaan.

Pasal 4

GWPP melakukan koordinasi dengan Menteri mengenai:

- a. pelaksanaan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan teknis atas pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan teknis di daerah yang dilakukan oleh pelaksana Dekonsentrasi sebagai penyelenggara Dekonsentrasi di bidang perdagangan,
- melalui pejabat pimpinan tinggi madya sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 5

Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada GWPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi di bidang perdagangan diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI



LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 02 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DI BIDANG PERDAGANGAN
 KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT TAHUN
 ANGGARAN 2023

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN ANGGARAN
 DANA DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
1	GUBERNUR ACEH	ACEH	1.119.165.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI DAERAH	775.115.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	78.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	51.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	136.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG DI DAERAH	300.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	27.014.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	152.101.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	344.050.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116.832.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	117.088.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	110.130.000
2	GUBERNUR SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	1.313.291.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI DAERAH	988.747.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.350.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	130.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	50.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	124.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	290.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	25.664.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	337.733.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	324.544.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	120.900.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	95.558.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	108.086.000
3	GUBERNUR SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	958.546.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DI DAERAH	643.534.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.150.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	88.000.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	48.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	125.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	125.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	93.664.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	132.720.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	315.012.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH 1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	104.924.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	103.092.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	106.996.000
4	GUBERNUR RIAU	RIAU	945.870.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	637.134.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.650.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	101.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	48.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	121.500.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	175.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	22.426.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	138.558.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	308.736.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	107.776.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	97.386.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	103.574.000
5	GUBERNUR JAMBI	JAMBI	1.191.687.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	883.590.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.900.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	68.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	47.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	114.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	380.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	98.830.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	144.860.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	308.097.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	116.049.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	88.384.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	103.664.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
6	GUBERNUR SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	790.272.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	487.848.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.200.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	102.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	45.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	116.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	21.528.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	172.120.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	302.424.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	103.560.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	97.800.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	101.064.000
		7	GUBERNUR BENGKULU
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	455.893.000		
1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.100.000		
2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	81.000.000		
3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	47.000.000		
4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	117.000.000		
5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	21.317.000		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	158.476.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	320.389.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	109.327.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	108.828.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	102.234.000
8	GUBERNUR LAMPUNG	LAMPUNG	879.888.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	591.853.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.700.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	85.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	43.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	109.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	195.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	18.551.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	109.602.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	288.035.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	102.975.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	86.514.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN	98.546.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PROMOSI KEPADA UKM	
9	GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	937.963.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	615.973.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.500.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	67.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	45.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	117.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	170.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	19.757.000
		PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	166.716.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	321.990.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	113.632.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	108.264.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	100.094.000
10	GUBERNUR KEPULAUAN RIAU	KEPULAUAN RIAU	944.629.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	475.842.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	75.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	70.000.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	50.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	123.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	7.666.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	150.176.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	468.787.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	136.098.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	121.373.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	211.316.000
11	GUBERNUR DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	594.992.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	317.242.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.500.000
		2 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	40.000.000
		3 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	97.500.000
		4 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	3.992.000
		5 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	144.250.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	277.750.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	96.486.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	98.720.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN	82.544.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PROMOSI KEPADA UKM	
12	GUBERNUR JAWA BARAT	JAWA BARAT	954.290.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	676.968.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.400.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	121.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	40.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	97.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	105.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	48.459.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	234.109.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	277.322.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	90.914.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	93.380.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	93.028.000
13	GUBERNUR JAWA TENGAH	JAWA TENGAH	986.625.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	682.528.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.300.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	120.000.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	45.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	113.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	120.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	118.122.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	135.106.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	304.097.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	101.417.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	102.624.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	100.056.000
14	GUBERNUR D.I. YOGYAKARTA	D.I. YOGYAKARTA	753.365.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	443.272.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.700.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	101.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	46.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	111.300.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	7.216.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	147.056.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	310.093.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR	105.127.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		NEGERI	
		2 LAYANAN PERKANTORAN	105.342.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	99.624.000
15	GUBERNUR JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	953.046.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	624.320.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.700.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	119.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	47.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	111.200.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	45.538.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	269.882.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	328.726.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	108.962.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	117.428.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	102.336.000
16	GUBERNUR BANTEN	BANTEN	872.961.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	611.050.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.200.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	65.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	39.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	101.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	225.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	14.680.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	135.170.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	261.911.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	91.659.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	78.032.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	92.220.000
17	GUBERNUR BALI	BALI	887.941.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	549.166.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.500.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	89.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	50.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	108.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	23.720.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	246.946.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	338.775.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	120.473.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	112.864.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	105.438.000
18	GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	1.199.529.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	865.944.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.750.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	84.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	50.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	114.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	335.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	8.808.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	243.386.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	333.585.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	125.733.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	102.266.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	105.586.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
19	GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	1.183.060.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	468.329.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.200.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	83.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	54.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	132.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28.739.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	139.390.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	714.731.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH	115.619.000
		1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		2 LAYANAN PERKANTORAN	135.720.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	307.876.000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	155.516.000
20	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	1.190.668.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	567.290.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.800.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	120.000.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	48.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	121.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	22.053.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	225.437.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	623.378.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	105.618.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	108.028.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	273.152.000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	136.580.000
21	GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	724.266.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	427.456.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.400.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	68.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	48.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	122.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	22.556.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	136.500.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	296.810.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	104.470.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	88.788.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	103.552.000
22	GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	772.521.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	448.597.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.700.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	85.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	50.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	130.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	23.285.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	129.612.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	323.924.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	115.302.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	104.534.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	104.088.000
23	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	920.441.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	591.327.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	86.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	52.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	135.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	27.389.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	260.938.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	329.114.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	112.102.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	107.136.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	109.876.000
24	GUBERNUR KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	880.498.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	401.099.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.500.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	50.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	55.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	142.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	8.997.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	114.602.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	479.399.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	134.578.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	145.940.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	117.900.000
		4 FASILITASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN KOORDINASI DI KAWASAN PERBATASAN	80.981.000
25	GUBERNUR SULAWESI UTARA	SULAWESI UTARA	1.172.476.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	817.314.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.500.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	68.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	54.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	133.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	345.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28.934.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	156.880.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	355.162.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	120.756.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	121.416.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	112.990.000
26	GUBERNUR SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	835.709.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	484.905.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.250.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	83.500.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	51.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	132.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	29.329.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	157.826.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	350.804.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	126.474.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	111.740.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	112.590.000
		27	GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	535.215.000		
1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.500.000		
2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	83.000.000		
3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	51.000.000		

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	120.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	98.051.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	152.664.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	317.339.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	108.501.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	101.124.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	107.714.000
28	GUBERNUR SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	1.052.679.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	711.950.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.750.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	83.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	52.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	127.000.000
		5 PENGGUNA PASAR LELANG YANG BERPARTISIPASI	235.000.000
		6 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	26.372.000
		7 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	157.828.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	340.729.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH	112.097.000
		1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	119.598.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	109.034.000
29	GUBERNUR GORONTALO	GORONTALO	816.722.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	485.813.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	30.800.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	65.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	54.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	140.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	28.712.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	167.301.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	330.909.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH	119.995.000
		1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		2 LAYANAN PERKANTORAN	98.880.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	112.034.000
30	GUBERNUR SULAWESI BARAT	SULAWESI BARAT	831.676.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	459.731.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	31.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	66.000.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	54.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	140.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	29.279.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	139.452.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	371.945.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH 1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	132.855.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	126.030.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	113.060.000
31	GUBERNUR MALUKU	MALUKU	965.095.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	565.201.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	101.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	56.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	143.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	35.483.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	159.718.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	399.894.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH 1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	149.878.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	128.264.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	121.752.000
32	GUBERNUR MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	953.616.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	575.147.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	70.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	102.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	56.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	146.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	34.082.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	167.065.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	378.469.000
		FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH	146.487.000
		1 TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	
		2 LAYANAN PERKANTORAN	111.948.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	120.034.000
33	GUBERNUR PAPUA	PAPUA	978.295.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	576.826.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	38.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	88.000.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	65.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	170.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	39.965.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	175.861.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	401.469.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	141.493.000
		2 LAYANAN PERKANTORAN	131.948.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	128.028.000
34	GUBERNUR PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	1.008.149.000
		PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH	557.781.000
		1 FASILITASI KEGIATAN PASAR MURAH	38.000.000
		2 FASILITASI PENYEDIAAN DATA HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING SERTA INFORMASI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	75.000.000
		3 FASILITASI KEGIATAN PANGAN NUSA	60.000.000
		4 DUKUNGAN ADMINISTRASI SATKER DEKONSENTRASI	155.000.000
		5 STANDARDISASI DAN PENGENDALIAN MUTU DI DAERAH	46.688.000
		6 PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DAERAH	183.093.000
		PENGEMBANGAN FASILITASI PERDAGANGAN LUAR NEGERI DAERAH	450.368.000
		1 FASILITASI DAN PEMBINAAN APARATUR DAERAH TERKAIT KEBIJAKAN BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	157.354.000

KODE	PELAKSANA	LOKASI/KEGIATAN/OUTPUT	JUMLAH (Rupiah)
		2 LAYANAN PERKANTORAN	156.574.000
		3 FASILITASI PELATIHAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN PROMOSI KEPADA UKM	136.440.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

